

NEWSLETTER-*JANUARI 2024*

KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAWAN DISINFORMASI PEMILU

#EDITORIAL

MELINDUNGI PEMILIH DARI DISINFORMASI, KOLABORASI MULTIPihak BELUM EFEKTIF

Sepanjang tahun 2023, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan sebanyak 1.292 disinformasi politik. Jumlah disinformasi politik di tahun ini lebih banyak dua kali lipat dari tahun 2019-tahun terselenggaranya Pemilu 2019-dimana ditemukan 644 disinformasi. Jumlah disinformasi politik di tahun 2023 memang lebih banyak dibandingkan lima tahun sebelumnya, yang jumlahnya secara berurutan sebagai berikut: 488, 644, 700, 428, dan 549.

Dari banyaknya disinformasi yang beredar, platform Youtube menjadi tempat ditemukan disinformasi terbanyak, yakni 44.6 persen. Disinformasi juga ditemukan di Facebook (34.4 persen), Tiktok (9.3 persen), Twitter atau X (8 persen), WhatsApp (1.5 persen), dan Instagram (1.4 persen).

Persentase disinformasi politik tahun 2023 sebanyak 55.5 persen yang ditemukan Mafindo, selain menjadi yang tertinggi, juga memposisikan disinformasi politik kembali mendominasi topik disinformasi pasca Pemilu 2019. Pada masa pandemi, disinformasi politik sempat turun rata-rata di bawah 33 persen.

Perlu dem mengkategorikan disinformasi pemilu menjadi tiga klasifikasi, yakni disinformasi yang menyerang peserta pemilu, disinformasi yang mendegitimasi proses pemilu, dan disinformasi teknis ke pemilu. Dari tiga kategori tersebut, ditemukan pula narasi yang menggunakan sentimen negatif terhadap suku, agama, ras, dan antarkelompok (SARA).

Contoh hoaks yang menyerang peserta pemilu dan menggunakan sentimen SARA:

[SALAH] DN Aidit dan Anies Baswedan Sama-sama Keturunan Yaman dan Ingin Berkuasa di NKRI



Sementara itu, pada disinformasi yang mendelegitimasi proses pemilu, topik-topik disinformasi yang ditemukan yakni, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpihak pada pasangan calon tertentu, KPU tidak mengadakan debat kandidat Pemilu Presiden untuk menguntungkan pasangan calon tertentu, KTP elektronik palsu untuk WNA Cina dan pengungsi Rohingya guna memenangkan pasangan calon tertentu, pendataan hak pilih disabilitas mental untuk digunakan dalam manipulasi suara, mobilisasi oleh RT untuk memenangkan pasangan calon tertentu, serta hasil pemilu sudah ditentukan KPU.

Contoh hoaks yang mendelegitimasi proses pemilu



Sementara itu, disinformasi mengenai teknis kepiluan belum ditemukan selama pada 2023. Namun sebagaimana terjadi di Pemilu 2019, disinformasi teknis kepiluan diprediksi akan muncul dan tersebar jelang hari pemungutan suara. Disinformasi teknis kepiluan inilah yang berpotensi besar menghilangkan hak memilih, seperti disinformasi bahwa e-KTP dapat digunakan untuk memilih di TPS mana pun.

Kolaborasi multipihak yang efektif diperlukan

Menghadapi ancaman disinformasi pemilu yang kerap disertai narasi kebencian dan diskriminatif yang menargetkan kelompok rentan dan minoritas, para pemangku kepentingan pemilu sudah membangun kolaborasi berbasis multipihak. Melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu menginisiasi forum multipihak yang turut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan platform media sosial. Para pihak telah tergabung di dalam satu saluran komunikasi, guna mempercepat koordinasi dan penanganan disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak pilih dan memicu konflik.

Beberapa kegiatan pencegahan juga telah disinergikan secara kolaboratif. Mafindo dan Perludem telah menyelenggarakan pelatihan prebunking untuk organisasi masyarakat sipil dan penyelenggara pemilu di beberapa daerah. Perludem dan Mafindo juga terlibat dalam penyusunan modul Tular Nalar 3.0. Edukasi isu-isu pemilu berbasis digital pun oleh seluruh organisasi anggota Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu yang terdiri dari Sembilan belas organisasi masyarakat sipil dan satu individu pegiat tata kelola digital.

Namun demikian, meski forum multipihak telah terbentuk, koordinasi efektif yang diharapkan belum terwujud. Belum ada sinergi pemantauan, pencegahan dan

penanganan disinformasi pemilu di antara para pihak.

Bawaslu sebagai koordinator forum multipihak perlu mengambil peran lebih aktif untuk menyinergikan pemantauan, pencegahan dan penanganan disinformasi pemilu. Forum multipihak rutin untuk saling meng-update hasil pemantauan dan konsolidasi juga perlu diefektifkan untuk mengambil langkah-langkah konkrit, seperti membangun database disinformasi pemilu bersama, sinergi pemantauan, dan deplatformisasi terhadap akun atau kanal yang memproduksi dan membagikan disinformasi pemilu secara terkoordinasi.

PERLUNYA DOKUMEN REKOMENDASI BERSAMA UNTUK PENANGANAN DISINFORMASI JELANG HARI PEMUNGUTAN SUARA

Rabu (31/1/2024), Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi mengadakan rapat multipihak bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam rapat ini, para pihak saling meng-update temuan-temuan disinformasi pemilu selama tahapan kampanye, dan mendiskusikan langkah bersama yang perlu dilakukan.

Perwakilan Kominfo mengatakan bahwa total hoaks pemilu per 31 Januari yakni, 238 hoaks, dengan persebaran 3.087 konten. Hoaks paling banyak disebar di platform Facebook, dengan 1.418 konten. Mayoritas hoaks yang beredar menyerang pasangan calon di Pemilu Presiden. Kominfo melakukan pemantauan selama 24 jam nonstop.

Selain Kominfo, BSSN juga melakukan monitoring disinformasi pemilu 24 jam nonstop. BSSN menemukan disinformasi yang menyerang proses pemilu, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. Isu yang muncul dalam disinformasi proses pemilu yaitu, disinformasi mengenai surat suara rusak, distribusi logistik, dan pemungutan suara di luar negeri.

Sementara itu, dalam melakukan pengawasan terhadap media sosial, Bawaslu berkolaborasi dengan Kominfo dan BSSN. Terdapat desk pemantauan di kantor Bawaslu RI, dengan anggota BSSN dan Kominfo yang bertugas di dalamnya.



“Jadi, kami berkolaborasi dengan Kominfo dan BSSN, karena ada problem SDM (sumber daya manusia) terbatas untuk meng-cover pemantauan media sosial 24 jam. Tetapi, tetap dilakukan pemantauan secara maksimal hingga level panwaslu kecamatan. Ada nomor hotline juga jika ada informasi mengenai dugaan pelanggaran pemilu, yang kemudian akan ditindaklanjuti ke Kominfo dan Cybercrime Polri,” kata tenaga ahli Bawaslu RI, Ronald Monoach, pada rapat multipihak.

Anggota Koalisi Lawan Disinformasi lainnya menyampaikan kegiatan yang tengah dilakukan. Sherly Haristya mengampu riset mengenai tanggungjawab platform media sosial dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat di masa pemilu. Berdasarkan riset tersebut, Sherly merekomendasikan agar standar komunitas platform dapat dibuat dengan mengacu pada undang-undang (uu) pemilu di suatu negara. Per 31 April, hanya Meta yang telah menyusun panduan komunitas berbasis UU Pemilu.

Yayasan TIFA pun tengah menyokong riset yang dilakukan Safenet terkait ujaran kebencian terhadap kelompok rentan. Data yang dikumpulkan oleh Safenet akan menjadi bukti untuk disampaikan kepada platform bahwa ekosistem platform masih mengizinkan adanya konten-konten ujaran kebencian yang menarget kelompok rentan.

Idealnya, platform memberikan umpan balik kepada pengguna yang melaporkan konten ujaran kebencian atau disinformasi, agar pengguna dapat mengikuti proses moderasi konten yang diambil platform.

Dari diskusi yang terbangun di antara multipihak, Koalisi merekomendasikan dilakukannya empat hal.

- Pertama, membuat dokumen bersama berisi temuan-temuan disinformasi dan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan yang dikumpulkan oleh Bawaslu, Kominfo, Mafindo, dan Safenet, serta rekomendasi kepada platform media sosial.
- Kedua, pembuatan worksheet bersama untuk mendata disinformasi pemilu.
- Ketiga, diseminasi kanal pelaporan hoaks yang dimiliki oleh Bawaslu, Kominfo, dan Mafindo.
- Keempat, pembuatan konten prebunking mengenai teknis dan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Disinformasi pemilu yang menjadi fokus pemantauan Koalisi yakni, disinformasi yang menyerang teknis pemilu, disinformasi proses pemilu, disinformasi hasil pemilu, disinformasi yang menyerang penyelenggara pemilu, dan disinformasi yang menyerang pemilih kelompok rentan.

Terlebih, pelaku ujaran kebencian merupakan akun buzzer yang memiliki keterkaitan dengan salah satu kandidat di Pilpres.



“Kami ingin menunjukkan bukti ke platform yang memungkinkan **hate speech** ini terjadi. Ketika kelompok rentan mendapat serangan, kami menawarkan bantuan keamanan digital. Ada **concern** konsolidasi data, jadi temuan yang diidentifikasi berbagai pihak penting untuk dikumpulkan untuk menjadi bahan advokasi bersama sehingga kita punya consolidated data,” ujar **program officer** Yayasan TIFA, Maharddhika.

Dhika menambahkan poin kurangnya transparansi dari platform media sosial terkait laporan ujaran kebencian dan disinformasi.



Tim editorial:

Nurul Amalia Salabi

Usep Hasan Sadikin

Desain by Haura Ihsani Amali.